



» PROGRAM PERMUKIMAN

### Raperda Rumah Susun Fokus Lindungi MBR

UMBULHARJO—DPRD Kota Jogja menatangkan pembahasan Raperda Rumah Susun. Raperda ini disusun untuk menyesuaikan aturan daerah dengan peraturan nasional terbaru, sekaligus memperkuat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan.

Anggota Pansus Raperda Rumah Susun DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan, menjelaskan bahwa dasar penyusunan regulasi ini adalah perlunya penyesuaian terhadap perubahan aturan di tingkat pusat. "Perda Kota Jogja No.2/2016 perlu ada penyesuaian dengan Undang-Undang Rumah Susun seiring terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Berangkat dari kondisi ini, kami mendukung Rancangan Peraturan Daerah Rumah Susun yang disetujui Wali Kota Jogja," ujarnya, Kamis (9/10).

Salah satu fokus utama dalam penyusunan raperda ini adalah mendukung pembangunan rumah susun yang menyediakan perumahan layak, terutama bagi MBR. Oleg menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Salah satu tujuan penyusunan perda ini untuk mendukung terwujudnya pembangunan rumah susun yang menyediakan perumahan layak bagi masyarakat. Kami merekomendasikan agar Pemkot Jogja melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan Perda ini," katanya.

Raperda juga menyesuaikan nomenklatur perizinan pembangunan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG), sebagaimana diatur dalam peraturan baru. DPRD mendorong pemerintah kota untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat maupun pelaku pembangunan.

"Kami mengimbau Pemkot Jogja agar melakukan sosialisasi secara maksimal terkait perubahan ini, terutama kepada pihak-pihak yang bergerak di bidang pembangunan," kata politikus Partai Nasdem ini.

Selain itu, terdapat ketentuan penting yang mewajibkan pelaku pembangunan untuk menyediakan paling sedikit 20% dari total luas lantai rumah susun komersial untuk MBR. Pemkot juga didorong memberikan insentif berupa keringanan biaya sewa, insentif perpajakan, serta kemudahan dalam pengurusan sertifikat kepemilikan.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardono, menjelaskan pemerintah siapakan sejumlah insentif bagi masyarakat yang menempati rumah susun, mulai dari keringanan biaya sewa, kemudahan pengurusan sertifikat kepemilikan, hingga insentif perpajakan bagi pengembang yang berkomitmen.

Pemerintah menilai pembangunan rumah susun merupakan solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Karena itu, Raperda juga mengatur standar konstruksi, pengelolaan lingkungan, serta pemantauan lahan untuk memastikan hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Page 10/10/2025

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005